Optimalisasi Peran Lembaga Keuangan Syariah dalam Inklusivitas Grand design Ekonomi Syariah di Tingkat Asia

Ichwan Arifin

Universitas Muhammadiyah Jakarta
ichwan.arifin@umj.ac.id

ABSTRACT

We will not receive God's kindness if we obey him and eat and drink from what He has commanded us to consume or from what He has made lawful. Our efforts, however, will be in futile if we disobey Him and continue to eat and drink from what is illegal. When we discuss halal products, we are discussing halal food items and beverages. Products that meet the requirements for legitimacy under Islamic Shariah are referred to as halal products. Items that are suitable for use with food and drink include: First, steer clear of anything that contains or is produced from pork. For example: bristle brushes made of swine feathers, lard (pork fat), gelatin, lechitine, and emulsifiers (E471). QS. Al-Baqarah (2):173 contains it. Both meats are from halal animals that were killed in accordance with Islamic Shariah regulations. Al-Maaidah, QS. (5):3. 3. Any food or beverage that isn't made with alcohol or any of its byproducts, or that purposefully adds non-alcohol ingredients and isn't khamr. QS. Al-Maaidah (5):90, Al-Baqarah (2):219. The fourth is neither blood nor a corpse that is off-limits to human consumption. Al-Baqarah, QS. (2): 173. Including any and all foods acquired lawfully. Everything is allowed to be consumed, especially food and liquids. Eat what is righteous and excellent in the earth, men, and do not walk in Satan's footsteps, for he is clearly your enemy. Notwithstanding the ongoing unpredictability caused by the COVID-19 pandemic, Dinar Standard projects that the six actual sharia economy sectors—halal food and drink, modest fashion, cosmetics, pharmaceuticals, media and recreation, and travel—will account for 9.1% of the total growth in Muslim spending worldwide by 2022. By 2025, this growth is predicted to have increased by 7.5% to US\$2.8 trillion. (CAGR)

Keywords: Sharia, Economy, Grand Design, Role, and Institution

ABSTRAK

Apabila makanan dan minuman kita terjaga dari yang diharamkan Allah, atau dengan kata lain kita hanya makan mengonsumsi yang dihalalkan Allah, niscaya ridho Allah itu tidak mustahil kita peroleh jika kita taat kepada-Nya. Tetapi sebaliknya, meskipun kita taat, namun kita makan dan minum dari yang haram yang bukan karena terpaksa, maka akan sia-sialah usaha kita. Jika berbicara tentang produk halal, maka sejatinya kita berbicara tentang makanan dan minuman halal. Produk Halal adalah produk yang memenuhi syarat kehalalan sesuai dengan Syariat Islam. Produk yang memenuhi makanan dan Minuman yang halal diantaranya adalah: Pertama, Tidak mengandung babi atau produk-produk yang berasal dari babi. Seperti: lard (lemak babi), gelatin babi, emulsifier babi (E471), lechitine babi, kuas dengan bulu babi (bristle). Hal ini terdapat dalam QS. Al-Baqarah (2):173. Kedua Daging yang berasal dari hewan halal yang disembelih menurut tata cara Syariat Islam. QS. al-Maaidah (5):3. Ketiga Semua bentuk makanan/minuman yang tidak mengandung alkohol dan turunannya, atau bukan alkohol sebagai

suatu ingredient yang sengaja ditambahkan, serta bukan khamr. QS. Al-Baqarah (2):219, Al-Maaidah (5):90. Keempat Bukan merupakan bangkai dan atau darah yang haram dimakan manusia. QS. Al-Baqarah (2):173. Termasuk segala jenis makanan yang didapat/diperoleh secara halal (halal lighairihi). Makanan yang diharamkan Allah SWT. Halal adalah segala sesuatu yang diperbolehkan oleh syari'at untuk di konsumsi, Terutama dalam hal makanan dan minuman. Firman Allah swt surat Al-Baqarah ayat 168: "Hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terbaik dibumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan; karena sesungguhnya syaitan itu musuh yang nyata bagimu. Ekonomi syariah merupakan bagian inti dari kebijakan pemulihan ekonomi pasca pandemi di beberapa negara. Terlepas dari berlanjutnya ketidakpastian global akibat pandemi COVID-19, Dinar Standard, dalam State of the Global Islamic Economy Report Tahun 2022 memperkirakan bahwa total pengeluaran umat muslim global pada tahun 2022 akan tumbuh sebesar 9,1%, yang berasal dari enam sektor riil ekonomi syariah yaitu sektor makanan dan minuman halal, modest fashion, kosmetika, farmasi, media dan rekreasi, serta travel. Pertumbuhan ini diperkirakan akan mencapai US\$2.8 triliun pada tahun 2025 atau meningkat 7,5% (CAGR)

Kata Kunci: *Peran, Lembaga, grand design, ekonomi, syari'ah*

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara dengan jumlah penduduk Muslim mencapai 87,18 persen dari populasi 232,5 juta jiwa (Global Islamic Economy Report 2018-2019). Ini adalah ukuran pangsa pasar produk dan jasa berbasis ekonomi syariah yang sangat besar. Menurut laporan yang sama, Indonesia termasuk 10 besar konsumen pada setiap sub-sektor dalam industri halal. Rinciannya adalah sebagai berikut:1. Peringkat pertama pada top muslim food expenditure. 2. Peringkat kelima pada kategori top muslim travel expenditure. 3. Peringkat ketiga pada top muslim apparel expenditure 4. Peringkat kelima pada top muslim media expenditure. 5. Peringkat keenam pada top muslim pharmaceuticals expenditure. Namun, pada kelima industri tersebut, Indonesia menempati posisi 10 besar menurut pemeringkatan Global Islamic Economy (GIE) Index hanya pada kategori pariwisata halal dan fesyen Muslim. Kondisi industri syariah di Indonesia saat ini menunjukkan bahwa sebagian besar konsumsi produk yang sesuai syariah atau halal1 di Indonesia masih dipasok dari produk-produk impor. Pasokan produk halal yang diimpor untuk memenuhi kebutuhan permintaan dalam negeri juga secara tidak langsung mempengaruhi neraca perdagangan Indonesia yang saat ini terus mengalami peningkatan defisit. Hal ini berarti industri halal Indonesia juga memegang peranan penting untuk dapat menekan defisit neraca perdagangan dengan membesarkan visi ekonomi keuangan syariah di Indonesia dikembangkan dari visi dan tujuan yang ingin dicapai oleh negara Republik Indonesia ke depan dengan mempertimbangkan perubahan-perubahan yang terjadi baik secara lokal maupun global. Dalam dokumen Indonesia 2045 yang dikeluarkan oleh Bappenas, visi Indonesia 2045 adalah Indonesia yang berdaulat, maju, adil dan makmur. Indonesia yang seperti itu menggambarkan kemandirian untuk mencapai tujuan serta

keinginan negara untuk melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, dan mencerdaskan kehidupan bangsa.

Selain itu, Indonesia juga berkomitmen untuk melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan social yang merupakan ciri masyarakat madani. Lebih jauh lagi, secara global, ekonomi syariah sudah mendapat perhatian dunia baik di Negara Muslim maupun non-Muslim. Hal ini ditandai dengan industri perbankan syariah dan industri halal berkembang pesat yang ini merupakan tren dunia. Oleh karena itu, banyak negara mulai melakukan reorientasi kebijakan ekonomi untuk memberikan perhatian lebih besar pada industri halal. Di beberapa negara Islam, pengembangan sektor ini juga telah menjadi kebijakan nasional dengan dukungan konsisten dan berkelanjutan dari pemerintah pusat dan daerah. Akan tetapi, hingga tahun 2018, Indonesia masih tercatat sebagai konsumen atau pasar produk/jasa halal terbesar dan belum menjadi pemain utama dalam ekonomi syariah dunia. Dibandingkan dengan negara lain, Indonesia masih belum mampu meningkatkan literasi dan kesadaran akan pentingnya sektor industri halal yang dijalankan dengan kebijakan pemerintah. Oleh karenanya, visi yang ingin dicapai dengan adanya Masterplan ini adalah menjadikan Indonesia yang mandiri, makmur dan madani dengan menjadi pusat ekonomi syariah terkemuka dunia. Selain dengan mempertimbangkan berbagai hal di atas, perumusan visi ini juga didasari oleh keinginan untuk menjadikan industri halal dan ekonomi syariah sebagai penopang perekonomian nasional, serta menjadi bagian penting dalam mewujudkan aspirasi bangsa sebagai negara yang adil, makmur, dan berdaulat. Selain itu, visi ekonomi syariah di Indonesia berlandaskan pada nilai-nilai keislaman, prinsip-prinsip dasar ekonomi syariah, serta potensi yang dimiliki oleh ekonomi syariah Indonesia saat ini. diteliti, tujuan khusus, dan urgensi penelitian.

TINJAUAN LITERATUR

Adapun regulasi perbankan syari'ah dan instansi instansi yang terlibat dalam menjalankan visi ekonomi dan keuangan syariah Indonesia yang mandiri, makmur dan madani ini, menjadikan pusat ekonomi dan keuangan syariah terkemuka dunia, yang terdapat empat target capaian utama yang direkomendasikan dalam grand design ini, yaitu (1) peningkatan skala usaha ekonomi syariah; (2) peningkatan peringkat dalam Islamic Economic Index global dan nasional; (3) peningkatan kemandirian ekonomi; dan (4) peningkatan indeks kesejahteraan. Masing-masing target capaian tersebut memiliki paling kurang satu indikator utama. Selain itu, target capaian utama tersebut juga memiliki koneksi dengan strategi utama dan quick wins kebijakan yang direkomendasikan adalah:

1. UU No. 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan Syariah Bank Indonesia, Bank Konvensional, Bank dengan prinsip bagi hasil PP No. 72 Tahun 1992 Tentang Bank Berdasarkan Prinsip Bagi Hasil

2. Kementerian Keuangan, Bank Indonesia, Bank Umum dan Bank Perkreditan Rakyat yang lain menjalankan usaha berdasarkan prinsip bagi hasil. Majelis Ulama Indonesia UU No. 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan UU No. 7 Tahun 1992 Bank Indonesia, Bank Konvensional, Bank Syariah UU No. 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah Bank Indonesia, Bank Syariah, Majelis Ulama Indonesia UU No. 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan Otoritas Jasa Keuangan, Perbankan dan Pasar Modal syariah, Industri Keuangan Non Bank.
3. POJK Nomor 24/POJK.03/2015 Tentang Produk dan Aktivitas Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah Otoritas Jasa Keuangan, Bank Umum Syariah, Bank Konvensional yang memiliki Unit Usaha Syariah POJK Nomor 2/POJK.03/2016 Tentang Pengembangan Jaringan Kantor Perbankan Syariah dalam Rangka Stimulus Perekonomian Nasional bagi Bank
4. Otoritas Jasa Keuangan, Bank Syariah POJK Nomor 3/POJK.03/2016 Tentang Bank Pembiayaan Rakyat Syariah di lembaga keuangan syariah yang terakui.
5. Otoritas Jasa Keuangan, Bank Pembiayaan Rakyat Syariah POJK Nomor 64/POJK.03/2016 Tentang Perubahan Kegiatan Usaha Bank Konvensional menjadi Bank Syariah
6. Otoritas Jasa Keuangan, Bank Konvensional yang memiliki Unit Usaha Syariah, Bank Umum Syariah POJK Nomor 44/POJK.03/2015 Tentang Sertifikasi Kompetensi Kerja Bagi Anggota Direksi dan Anggota Dewan Komisaris Bank Perkreditan Rakyat Dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah
7. Otoritas Jasa Keuangan, Bank Umum Syariah, Bank Konvensional yang memiliki Unit Usaha Syariah POJK Nomor 16/POJK.03/2014 Tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah.
8. Otoritas Jasa Keuangan, Bank Umum Syariah, Bank Konvensional yang memiliki Unit Usaha Syariah, POJK Nomor 21/POJK.03/2014 Tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bank Umum Syariah.
9. Otoritas Jasa Keuangan, Bank Umum Syariah, Bank Konvensional yang memiliki Unit Usaha Syariah POJK Nomor 12/POJK.03/2015 Tentang Ketentuan Kehati-hatian Dalam Rangka Stimulus Perekonomian Nasional bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah.
10. Otoritas Jasa Keuangan, Bank Umum Syariah, Bank Konvensional yang memiliki Unit Usaha Syariah POJK Nomor 66 /POJK.03/2016 Tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum dan Pemenuhan Modal Inti Minimum Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Otoritas Jasa Keuangan, Bank Pembiayaan Rakyat Syariah
11. 362 Masterplan Ekonomi Syariah Indonesia Regulasi pasar modal syariah Kegiatan pasar modal syariah di Indonesia diatur dengan berbagai regulasi yang didasarkan pada fatwa yang diterbitkan oleh Dewan Syariah Nasional – Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI). Dasar hukumnya mengacu kepada Undang- Undang No. Tahun 1995 tentang Pasar Modal. Perkembangan pasar modal syariah Indonesia diawali dengan penerbitan reksa Dana syariah pada tahun 1997. Selanjutnya diikuti dengan munculnya Jakarta Islamic Index (JII) pada tahun 2000 dan diterbitkannya Obligasi Syariah Mudharabah pada tahun 2002. Pada

tanggal 18 April 2001, untuk pertama kali Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) mengeluarkan fatwa yang berkaitan langsung dengan pasar modal, yaitu Fatwa Nomor 20/DSN-MUI/IV/2001 tentang Pedoman Pelaksanaan Investasi Untuk Reksa Dana Syariah. Dalam rangka memberikan kepastian hukum, Bapepam LK menerbitkan paket regulasi pasar modal syariah pada tahun 2006. Paket peraturan tersebut yaitu Peraturan Bapepam dan LK Nomor IX.A13 tentang Penerbitan Efek Syariah dan Nomor IX.A.14 Tentang Akad-akad yang digunakan dalam Penerbitan Efek Syariah di Pasar Modal. Pada tahun 2008, perkembangan pasar modal syariah mencapai tonggak sejarah dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2008 Tentang Surat Berharga Syariah Negara (SBSN). Berdasarkan UU SBSN ini lalu pemerintah menerbitkan SBSN seri IFR0001 dan IFR0002

12. untuk pertama kalinya pada tanggal 30 Juni 2009, Bapepam-LK telah melakukan penyempurnaan terhadap Peraturan Bapepam-LK Nomor IX.A.13 Tentang Penerbitan Efek Syariah dan II.K.1 tentang Kriteria dan Penerbitan Daftar Efek Syariah. Pada masa Otoritas Jasa Keuangan, dalam rangka memperkuat pengaturan pasar modal syariah, terdapat revisi atas Peraturan No.IX.A.13 mengenai Penerbitan Efek Syariah menjadi beberapa peraturan berdasarkan produk dan satu peraturan mengenai penerapan prinsip syariah di pasar modal. Selain itu, juga terdapat beberapa peraturan baru yang terbit, baik tentang produk pasar modal, kelembagaan dan profesi maupun tata kelola. Untuk mencapai tujuan dan menjadikan lembaga ekonomi dan keuangan syariah terkemuka dunia, Indonesia harus menunjukkan peningkatan dalam berbagai rangking global terkait ekonomi syariah. Tidak hanya itu, mengingat tujuan akhir pengembangan ekonomi syariah adalah masyarakat yang mandiri, makmur, dan madani dalam kerangka negara kesatuan Republik Indonesia, maka diperlukan metode metode peningkatan indeks nasional yang relevan juga untuk mencapai tujuan terkait, sebagai tindak lanjut pada penelitian ini.

No	Capaian Utama	Base Line (2018)	2019-					
			2020	2021	2022	2023	2024	
01	Peningkatan skala Usaha: a. Peningkatan skala usaha di bidang ekonomi dan keuangan syariah sebesar 100 persen	Belum ada pengukuran skala usaha ekonomi syariah yang spesifik dan	Kajian pengukuran skala usaha ekonomi syariah					

Economic Reviews Journal

Volume 3 Nomor 1 (2024) 641 - 654 E-ISSN 2830-6449

DOI: 10.56709/mrj.v3i1.213

	(atau dua kali lipat kondisi saat ini) dalam 5 tahun ke depan. b. Kenaikan market share keuangan syariah menjadi 20 persen dalam 5 tahun ke depan.	menjadi acuan nasional 8.58%	9% 10% 15% 17,50%
02	Peningkatan Peringkat Islamic Index; a) Masuk ke dalam peringkat 5 besar di Global Islamic Economy Index (GIEI) dalam 5 tahun ke depan. b) Mencapai kinerja memuaskan dalam Indeks Ekonomi dan Keuangan Syariah Nasional dalam 5 tahun kedepan.	Peringkat 10 besar (bersama Jordan) Belum ada Indeks Ekonomi Syariah Nasional	Peringkat 9 Per-8 Per-7 Per-6 Per-5 Penyusunan Index Eko. Syariah Nasional - - - -
03	Peningkatan Kemandirian Ekonomi: a) Peningkatan share ekspor industri halal terhadap PDB Indonesia sebesar	Belum ada pengukuran terhadap komponen industri halal dalam PDB	

Economic Reviews Journal

Volume 3 Nomor 1 (2024) 641 - 654 E-ISSN 2830-6449

DOI: 10.56709/mrj.v3i1.213

	<p>100 persen (menjadi dua kali lipat kondisi saat ini) dalam 10 tahun ke depan</p> <p>b) Peningkatan share ekspor industri halal terhadap PDB Indonesia sebesar 100 persen (menjadi dua kali lipat kondisi saat ini) dalam 10 tahun ke depan.</p>	<p>Indonesia (PDB Syariah)</p> <p>Belum ada pengukuran yang spesifik</p>	
04	<p>Perbaikan indeks kesejahteraan</p> <p>a) Membangun Indeks maqasid syariah nasional dan internasional</p> <p>b) Meningkatkan skor/kinerja dalam indeks maqasid syariah nasional dan internasional</p>	<p>Belum ada Indeks maqasid syariah nasional dan internasional</p>	

METODE PENELITIAN

Adapun regulasi perbankan syariah dan instansi instansi yang terlibat dalam menjalankan visi ekonomi dan keuangan syariah Indonesia yang mandiri, makmur dan madani ini, menjadikan pusat ekonomi dan keuangan syariah terkemuka dunia, yang terdapat empat target capaian utama yang direkomendasikan dalam grand design ini, yaitu (1) peningkatan skala usaha ekonomi syariah; (2) peningkatan peringkat dalam Islamic Economic Index global dan nasional; (3) peningkatan kemandirian ekonomi; dan (4) peningkatan indeks kesejahteraan. Masing-masing target capaian tersebut memiliki paling kurang satu indikator utama. Selain itu, target capaian utama tersebut juga memiliki koneksi dengan strategi utama dan quick wins kebijakan yang direkomendasikan adalah:

1. UU No. 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan Syariah Bank Indonesia, Bank Konvensional, Bank dengan prinsip bagi hasil PP No. 72 Tahun 1992 Tentang Bank Berdasarkan Prinsip Bagi Hasil
2. Kementerian Keuangan, Bank Indonesia, Bank Umum dan Bank Perkreditan Rakyat yang lain menjalankan usaha berdasarkan prinsip bagi hasil. Majelis Ulama Indonesia UU No. 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan UU No. 7 Tahun 1992 Bank Indonesia, Bank Konvensional, Bank Syariah UU No. 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah Bank Indonesia, Bank Syariah, Majelis Ulama Indonesia UU No. 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan Otoritas Jasa Keuangan, Perbankan, Pasar Modal syariah, Industri Keuangan Non Bank.
3. POJK Nomor 24/POJK.03/2015 Tentang Produk dan Aktivitas Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah Otoritas Jasa Keuangan, Bank Umum Syariah, Bank Konvensional yang memiliki Unit Usaha Syariah POJK Nomor 2/POJK.03/2016 Tentang Pengembangan Jaringan Kantor Perbankan Syariah dalam Rangka Stimulus Perekonomian Nasional bagi Bank
4. Otoritas Jasa Keuangan, Bank Syariah POJK Nomor 3/POJK.03/2016 Tentang Bank Pembiayaan Rakyat Syariah di lembaga keuangan syariah yang telah di akui.
5. Otoritas Jasa Keuangan, Bank Pembiayaan Rakyat Syariah POJK Nomor 64/POJK.03/2016 Tentang Perubahan Kegiatan Usaha Bank Konvensional menjadi Bank Syariah
6. Otoritas Jasa Keuangan, Bank Konvensional yang memiliki Unit Usaha Syariah, Bank Umum Syariah POJK Nomor 44/POJK.03/2015 Tentang Sertifikasi Kompetensi Kerja Bagi Anggota Direksi dan Anggota Dewan Komisaris Bank Perkreditan Rakyat Dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah
7. Otoritas Jasa Keuangan, Bank Umum Syariah, Bank Konvensional yang memiliki Unit Usaha Syariah POJK Nomor 16/POJK.03/2014 Tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah.
8. Otoritas Jasa Keuangan, Bank Umum Syariah, Bank Konvensional yang memiliki Unit Usaha Syariah, POJK Nomor 21/POJK.03/2014 Tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bank Umum Syariah.

9. Otoritas Jasa Keuangan, Bank Umum Syariah, Bank Konvensional yang memiliki Unit Usaha Syariah POJK Nomor 12/POJK.03/2015 Tentang Ketentuan Kehati-hatian Dalam Rangka Stimulus Perekonomian Nasional bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah.
10. Otoritas Jasa Keuangan, Bank Umum Syariah, Bank Konvensional yang memiliki Unit Usaha Syariah POJK Nomor 66 /POJK.03/2016 Tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum dan Pemenuhan Modal Inti Minimum Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Otoritas Jasa Keuangan, Bank Pembiayaan Rakyat Syariah
11. 362 Masterplan Ekonomi Syariah Indonesia Regulasi pasar modal syariah Kegiatan pasar modal syariah di Indonesia diatur dengan berbagai regulasi yang didasarkan pada fatwa yang diterbitkan oleh Dewan Syariah Nasional – Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI). Dasar hukumnya mengacu kepada Undang- Undang No. Tahun 1995 tentang Pasar Modal. Perkembangan pasar modal syariah Indonesia diawali dengan penerbitan reksa Dana syariah pada tahun 1997. Selanjutnya diikuti dengan munculnya Jakarta Islamic Index (JII) pada tahun 2000 dan diterbitkannya Obligasi Syariah Mudharabah pada tahun 2002. Pada tanggal 18 April 2001, untuk pertama kali Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) mengeluarkan fatwa yang berkaitan langsung dengan pasar modal, yaitu Fatwa Nomor 20/DSN-MUI/IV/2001 tentang Pedoman Pelaksanaan Investasi Untuk Reksa Dana Syariah. Dalam rangka memberikan kepastian hukum, Bapepam LK menerbitkan paket regulasi pasar modal syariah pada tahun 2006. Paket peraturan tersebut yaitu Peraturan Bapepam dan LK Nomor IX.A.13 tentang Penerbitan Efek Syariah dan Nomor IX.A.14 Tentang Akad-akad yang digunakan dalam Penerbitan Efek Syariah di Pasar Modal. Pada tahun 2008, perkembangan pasar modal syariah mencapai tonggak sejarah dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2008 Tentang Surat Berharga Syariah Negara (SBSN). Berdasarkan UU SBSN ini lalu pemerintah menerbitkan SBSN seri IFR0001 dan IFR0002
12. untuk pertama kalinya pada tanggal 30 Juni 2009, Bapepam-LK telah melakukan penyempurnaan terhadap Peraturan Bapepam-LK Nomor IX.A.13 Tentang Penerbitan Efek Syariah dan II.K.1 tentang Kriteria dan Penerbitan Daftar Efek Syariah. Pada masa Otoritas Jasa Keuangan, dalam rangka memperkuat pengaturan pasar modal syariah, terdapat revisi atas Peraturan No.IX.A.13 mengenai Penerbitan Efek Syariah menjadi beberapa peraturan berdasarkan produk dan satu peraturan mengenai penerapan prinsip syariah di pasar modal. Selain itu, juga terdapat beberapa peraturan baru yang terbit, baik tentang produk pasar modal, kelembagaan dan profesi maupun tata kelola. Untuk mencapai tujuan dan menjadikan lembaga ekonomi dan keuangan syariah terkemuka dunia, Indonesia harus menunjukkan peningkatan dalam berbagai rangking global terkait ekonomi syariah. Tidak hanya itu, mengingat tujuan akhir pengembangan ekonomi syariah adalah masyarakat yang mandiri, makmur, dan madani dalam kerangka negara kesatuan Republik

Indonesia, maka diperlukan metode metode peningkatan indeks nasional yang relevan juga untuk mencapai tujuan terkait, sebagai tindak lanjut pada penelitian ini.

HASIL DAN PENELITIAN

Penelitian ini merupakan program unggulan untuk memperkuat Halal Value Chain, terdapat lima program utama seperti dibawah ini:

1. Membangun kawasan industri halal dan halal hub di berbagai daerah sesuai dengan comparative advantage masing-masing daerah unggulan.

Hal ini didukung oleh pusat riset yang memiliki kapasitas unggul. Program ini bertujuan untuk mendorong pengembangan industri halal yang berbasis regional sesuai dengan karakteristik dan comparative advantage masing-masing daerah. Selain itu untuk efisiensi produksi industri halal, halal hub yang terbentuk di berbagai daerah diharapkan dapat berkontribusi terhadap penyerapan tenaga kerja dan peningkatan kapasitas ekonomi regional. Dalam konteks pembangunan halal hub berbasis daerah, peran pemerintah daerah menjadi krusial untuk dapat menciptakan iklim pengembangan industri halal yang kondusif di daerah masing-masing

2. Memperkuat infrastruktur untuk meningkatkan efektivitas dan standarisasi proses sertifikasi halal di Indonesia (Halal Center, Lembaga Penjamin Halal, perwakilan BPJPH, Sistem Informasi Halal, dll).

Sertifikasi halal akan menjadi faktor yang berkontribusi dalam keputusan pembelian konsumen. Industri halal Indonesia secara mayoritas masih ditopang oleh industri kecil dan menengah. Di mata mereka, sertifikasi halal produk sampai saat ini belum menjadi prioritas sehingga efektifitasnya menjadi sangat dibutuhkan untuk menunjang pengembangan industri halal. Untuk itu, diperlu infrastruktur pendukung dalam mendorong efektivitas sertifikasi halal melalui berbagai lembaga

penunjang seperti lembaga halal center, lembaga penjamin halal, perwakilan BPJPH di level daerah,

dan juga melalui sistem informasi halal yang terintegrasi.

3. Meningkatkan jangkauan (outreach) melalui sosialisasi/edukasi publik halal lifestyle

Literasi halal diartikan sebagai kemampuan untuk membedakan barang dan jasa yang diperbolehkan dan tidak diperbolehkan berdasarkan aturan yang diturunkan dari hukum dan nilai Islam. Rendahnya literasi halal secara otomatis juga berdampak pada rendahnya kesadaran halal di masyarakat. Program utama berupa kampanye nasional gaya hidup halal diharapkan mampu untuk meningkatkan literasi dan kesadaran masyarakat dalam memilih

gaya hidup halal. Selain itu, ekonomi dan industri halal juga dapat disosialisasikan melalui bahan ajar dalam kurikulum sekolah dan perguruan tinggi.

4. Program Insentif bagi lokal dan global player untuk berinvestasi dalam mendukung perkembangan HVC secara komprehensif

Mulai dari bahan baku, produksi, distribusi dan Promosi Komponen utama dari industri halal adalah

bahan baku. Hingga saat ini, bahan baku yang digunakan dalam proses produksi sebagian besar masih bersumber dari bahan baku impor. Padahal Indonesia dengan sumber daya alam yang melimpah mampu untuk dapat menghasilkan bahan baku bagi industri halal. Namun demikian, faktor keterbatasan penggunaan teknologi dan keterbatasan pendaan menjadi penghambat dari sisi pasokan. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, diperlukan kerjasama dengan pemain besar di level lokal dan global untuk dapat berinvestasi langsung di Indonesia. Dengan adanya proses produksi oleh pemain besar di dalam negeri diharapkan dapat meningkatkan output produksi bahan baku dalam jangka pendek dan dapat mempercepat terjadinya transfer of technology dalam jangka panjang. Oleh karena itu, program insentif diperlukan untuk dapat menarik minat pemain besar, baik di level lokal maupun global, agar berinvestasi langsung di dalam negeri. Program insentif investasi ini mencakup rantai bahan baku, produksi, distribusi hingga promosi.

5. Memperkuat kerjasama dan pengakuan internasional untuk memperluas pasar produk halal Indonesia, diantaranya melalui standardisasi dan harmonisasi dengan dibentuknya international halal center di Indonesia

Untuk dapat menjadi pemain utama di industri halal internasional, dibutuhkan promosi dan advokasi yang kuat dari pemerintah kepada pemerintah lain (G to G) untuk mendapatkan pengakuan internasional mengenai standardisasi produk dan sertifikasi halal di Indonesia untuk memperluas pasar ekspor produk halal Indonesia. Kerjasama G to G di level internasional disasar

untuk mendorong penguatan halal value chain dengan melibatkan semua pihak terkait (di bawah

koordinasi KNKS, Kementerian Luar Negeri, dan Kementerian Perdagangan). Hal ini dapat dilakukan dengan adanya inisiatif untuk mendirikan nternational halal centre yang bertujuan untuk

mejembatani kerja sama Indonesia dengan pihak luar negeri dalam mengembangkan industri halal di Tanah Air. Selain kerjasama G to G, penguatan kerjasama ekonomi internasional juga

dapat diinisiasi melalui keikutsertaan Indonesia secara rutin dalam mengikuti pameran dan kompetisi internasional untuk memperkuat eksistensi Indonesia di industri halal internasional. Selain itu, International halal center berfungsi untuk mendorong promosi dan kerjasama internasional untuk produk dan industri halal di Indonesia sebagai berikut.

- Positioning baik secara G to G maupun kesepakatan secara multilateral dalam berbagai HVC (seperti makanan dan minuman, pariwisata, dan obat-obatan).
- Positioning Indonesia dalam business halal value chain secara global melalui berbagai forum internasional yang memiliki dampak signifikan dalam mendorong industrial competitiveness.
- Positioning Indonesia dalam pengembangan kerangka regulasi sektor keuangan secara global yang mencakup sektor keuangan komersial, sosial, moneter, makroprudensial dan makroekonomi.

Kelima program utama ini sedang dilaksanakan dalam periode 2019 hingga 2024.

KESIMPULAN

Beberapa program dijadikan quick wins untuk dapat dilakukan dalam waktu 1-2 tahun. Adapun program yang dianggap penting namun belum bisa dilaksanakan dalam jangka pendek, dapat dilakukan persiapan pelaksanaan dalam kurun waktu 1-2 tahun. Berikut adalah pengembangan quick wins masterplan ini:

1. Penguatan aspek hukum dan koordinasi.
2. Kampanye nasional gaya hidup halal.
3. Mendorong pengelolaan national halal fund.
4. Pendirian regional halal hub/halal center untuk penguatan industri halal dalam negeri.
5. Pendirian dan aktivasi islamic inclusive

financial services board (IIFSB) yang berpusat di Indonesia Penguatan kerja sama ekonomi internasional melalui international halal centre. Kegiatan kerja sama internasional ini dapat dilakukan sejak awal, termasuk inisiasi dan persiapan pendirian international halal centre yang ditargetkan dapat terlaksana pada tahun 2024.

Tahapan di bawah ini menunjukkan target outcome didapatkan atas program yang dilakukan:

Proses Output- Outcome

- 1 Penguatan Aspek Hukum dan Koordinasi

Economic Reviews Journal

Volume 3 Nomor 1 (2024) 641 – 654 E-ISSN 2830-6449
DOI: 10.56709/mrj.v3i1.213

- Adanya Revisi UU zakat dan UU wakaf • Meningkatnya realisasi penghimpunan zakat
 - Meningkatnya realisasi penghimpunan wakaf
- 2 Kampanye Nasional 'Halal Lifestyle'
- Adanya sosialisasi dan edukasi mengenai literasi produk halal
 - Kampanye cinta produk halal dalam negeri
 - Adanya topik mengenai ekonomi dan industri halal di dalam kurikulum sekolah dan perguruan tinggi di Indonesia dan Asia.
 - Peningkatan konsumsi produk halal dalam negeri
 - Peningkatan skala usaha ekonomi syariah
 - Topik mengenai ekonomi dan industri halal di adopsi dalam kurikulum sekolah dan perguruan tinggi
- 3 Mendorong Pengelolaan National Halal Fund
- Terbentuknya national halal fund yang bertujuan untuk mengkoordinasikan pendanaan industri halal dan penguatan value chain
 - Program Insentif bagi lokal dan global player untuk berinvestasi dalam mendukung perkembangan HVC secara komprehensif (mulai dari bahan baku, produksi, distribusi dan promosi)
 - Adanya platform pembiayaan yang efisien
 - Dana investasi untuk pembiayaan industri halal dari dalam negeri terus meningkat.

DAFTAR PUSTAKA

- Achmad Sadiro dkk. 2021. Literasi Ekonomi Islam menuju Pusat Industri halal Indonesia. *Sricommerce: Journal of Sriwijaya Community Services*, Vol. 2 No.1.
- Agus Putra, Panji Adam. 2017. Kedudukan Sertifikasi Halal Dalam Sistem Hukum Nasional Sebagai Upaya Perlindungan Konsumen Dalam Hukum Islam. *Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah* Vol. 1 No. 1.
- Anafarhanah, Sri. 2019. Tren Busana Muslimah Dalam Perspektif Bisnis dan Dakwah. *Alhadharah: Jurnal Ilmu Dakwah* Vol. 18 No. 1
- Beik,Irfan Syauqi. 2016. *Ekonomi Pembangunan Syariah*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Fadlan. 2010. Konsep Pembangunan Ekonomi Berbasis Islam, *Jurnal al-ikham* Vol. V No. 2.

Economic Reviews Journal

Volume 3 Nomor 1 (2024) 641 – 654 E-ISSN 2830-6449
DOI: 10.56709/mrj.v3i1.213

- Faridah, Hayyun Durrotul. 2019. Sertifikasi Halal di Indonesia: Sejarah, Perkembangan dan Implementasi, *Journal of Halal Product and Research* Vol. 2 No. 2.
- Hidayat, Asep Syarifudin. 2015. Argumentasi Hukum Jaminan Produk Halal. *Jurnal Bisnis Islam* Vol. 8 No. 1
- Huda, Nurul. 2015. *Ekonomi Pembangunan Islam*. Jakarta: Prenadamedia.
- Izzati, Khairana. 2019. KNKS Berkomitmen untuk Dukung Kawasan Industri Halal di Indonesia, 01 Juli
<https://knks.go.id/isuutama/15/knks-berkomitmen-untuk-173-dukung-kawasan-industri-halal-di-indonesia>. Diakses pada tanggal 15 Januari 2021.
- <https://kemenperin.go.id/artikel/22084/Upaya-Kemenperin-Wujudkan-Indonesia-Jadi-Pemain-Andal-di-Industri-Halal>. Diakses pada tanggal 3 Februari 2021.
- Jhingan. 2014. *Ekonomi Pembangunan dan Perencanaan*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Karim, Adiwarmar Azwar. 2014. *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/ Badan Perencanaan Pembangunan Nasional. 2018. *Masterplan Ekonomi Syariah Indonesia 2019-2024 Hasil Kajian Analisis Ekonomi Syariah di Indonesia*, Jakarta: BPPN.
- Kuncoro, Mudrajad. 2010. *Dasar – Dasar Ekonomika Pembangunan*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- Rozalinda. 2016. *Ekonomi Islam: Teori dan Aplikasinya pada Aktivitas Ekonomi*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Santika Dewi, Nyoman Lilya. 2014. Pengaruh Komponen Indeks Pembangunan Manusia Terhadap Pertumbuhan - Ekonomi Provinsi Bali. *E-Journal Ekonomi Pembangunan Universitas Udayana*. Vol. 3 No. 3.
- Subianto. 2018. Rantai Nilai dan Perspektif Kesadaran Masyarakat Muslim Akan Makanan Halal. *Conference Islamic Management, Accounting, and Economics (CIMAЕ) Proceeding* Vol. 2 No. 1. Hal. 174
- Syafrida. 2015. *Sertifikat Halal Pada Produk Makanan dan Minuman Memberi Perlindungan dan Kepastian Hukum Hak – Hak Konsumen*. ADIL: *Jurnal Hukum*. Vol. 7 No. 2. - TEMPO.CO
<https://bisnis.tempo.co/read/1430517/ini-8-program-kerja-utama-kneks-tingkatkan-industri-halal>. Diakses pada tanggal 4 April 2021.
- Wicaksono, Eko. 2015. Analisis Pertumbuhan Ekonomi dan Faktor – Faktor yang Mempengaruhi di Provinsi Jawa Tengah. *Diponegoro Journal of Economics* Vol. 2 N